

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang cukup besar pada tahun 1998, dan sektor yang mampu bertahan pada saat itu adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Triwijayati, 1967). UMKM merupakan pihak yang memiliki peranan cukup besar dalam pergerakan perekonomian nasional. UMKM memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran (Yusuf, 2018).

Pandemi COVID-19 berimbas besar pada kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami oleh UMKM menjadi ancaman besar bagi perekonomian nasional, mengingat UMKM merupakan penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI pada tahun 2020 telah melakukan Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mendiagnosa dampak pandemi pada kelangsungan UMKM serta mengidentifikasi strategi pemulihan kinerja UMKM (Biro Kerja Sama, Hukum, 2020).

Data survei kajian cepat dampak pandemi covid-19 menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3%

usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan 8,84% usaha yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Berdasarkan metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 47,44% usaha penjualan offline/fisik, 40,17% usaha penjualan online, dan 39,41% usaha dengan metode penjualan offline sekaligus online (Biro Kerja Sama, Hukum, 2020).

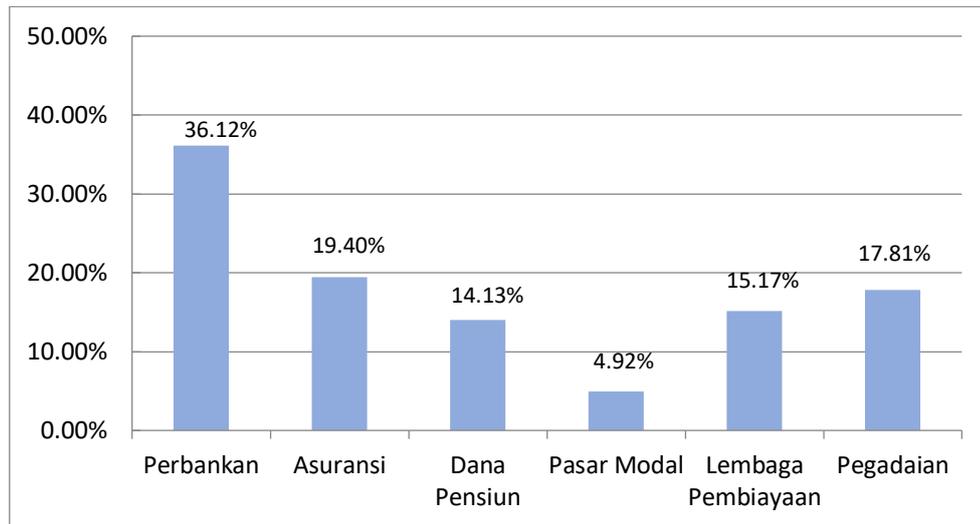
Bisnis UMKM memiliki beberapa kelemahan dalam beroperasi, diantaranya adalah kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Rendahnya daya saing UMKM di Indonesia antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian, sulitnya mengurus perizinan bagi UMKM, kurangnya akses pemodal, kurangnya dukungan infrastruktur, dan kurangnya inovasi (Yusuf, 2018).

Salah satu penyebab rendahnya kinerja UMKM adalah karena kurangnya akses pemodal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap keberadaan lembaga keuangan. Untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, pelaku UMKM harus mengetahui dan memahami akan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini dikenal dengan literasi keuangan (*financial literacy*) (Deviana, 2019).

Literasi keuangan (*financial literacy*) dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (Ramadhan, 2017). Literasi keuangan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan

melakukan perencanaan terhadap keuangan. Menurut (OJK, 2017) literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Semakin meningkatnya pemahaman akan literasi keuangan mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang menabung dan berinvestasi sehingga semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi. Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% penduduk Indonesia yang sudah terkategori *well literature*. Kategori *well literature* berarti masyarakat telah teredukasi dan memiliki trust akan lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan, meliputi fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta terampil dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%. Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Meski naik, potensi untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi perekonomian masih sangat besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).



Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, 2019

**Gambar 1.1**  
**Diagram Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia (Sektoral)**

Diagram diatas menunjukkan presentase indeks keuangan berdasarkan tingkat sektoral di Indonesia yang diakses melalui website OJK. Indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 36,12 persen pada sektor perbankan, diikuti oleh sektor asuransi sebesar 19,40 persen, kemudian sektor pegadaian sebesar 17,81 persen, lembaga pembiayaan sebesar 14,13 persen dan dana pensiun sebesar 14,13 persen serta indeks terendah yaitu sektor pasar modal sebesar 4,92 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah untuk pertama kalinya diukur dalam SNLIK pada tahun 2016 yang dilakukan oleh pihak OJK. Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat sedikit yaitu pada tahun 2016 mencapai 8,11%. Pada tahun 2018, data OJK menyebutkan literasi keuangan syariah hanya meningkat menjadi 8,93%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional. Hal

tersebut sangat ironis mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam (Wahyu, 2019).

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangannya agar sesuai dengan ajaran Islam (Yulianto, 2018). Literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam didalamnya.

**Tabel 1.1 Tingkat Literasi Keuangan di Wilayah Sulawesi**

<b>Wilayah</b>	<b>Indeks (%)</b>
<b>Sulawesi Utara</b>	36,65%
<b>Sulawesi Tengah</b>	39,63%
<b>Sulawesi Selatan</b>	32,46%
<b>Sulawesi Tenggara</b>	36,75%
<b>Gorontalo</b>	31,23%
<b>Sulawesi Barat</b>	34,91%

Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 indeks literasi keuangan tertinggi yaitu Sulawesi Tengah sebesar 39,63%. Sedangkan posisi terendah terdapat di wilayah Gorontalo yang hanya sebesar 31,23%. Hal tersebut menjadikan Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang menjadi obyek OJK dalam pengedukasian literasi keuangan. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait literasi keuangan kepada masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Secara geografis, Provinsi Gorontalo berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara

di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan laut Sulawesi di sebelah Utara (Gorontalo, 2015).

Saat ini keuangan syariah makin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan berlandaskan syariat Islam (Nofinawati, 2016). Islam adalah agama yang sangat memperhatikan literasi. Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan memberikan arahan dalam hal memperoleh pendapatan atau penghasilan, mengkonsumsinya, menabung, berinvestasi, mengelola harta, dan segala aspek yang berkaitan dengan keuangan (Yusuf, 2018).

Pengelolaan keuangan sangat penting untuk pengelolaan keuangan personal (pribadi) juga untuk perusahaan, baik skala mikro, kecil, juga menengah. Subjek penelitian ini adalah para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya para pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo. UMKM dipilih karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Namun perkembangan finansial UMKM ini tergolong lambat. Hal ini dikarenakan berdasarkan beberapa penelitian tentang pelaku usaha masih ditemukan rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan para pelaku usaha (Ramadhan, 2017).

Tingkat literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi. Pemahaman pada demografi adalah sebuah gambaran tentang latar belakang seseorang sehingga dapat mempengaruhi literasi keuangannya (Baiq Fitri Arianti

& Khoirunnisa Azzahra, 2020). Faktor-faktor yang dimaksud adalah jenis kelamin, usia, lama usaha, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2019), ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah seseorang dipengaruhi oleh faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yusuf, 2018), hasilnya menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pedagang sektor non formal di kawasan masjid Raya At-Taqwa termasuk dalam kategori *less literate* yang berarti pedagang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan syariah, produk keuangan syariah, dan jasa keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Prihatin & Maruf, 2019) menunjukkan rata-rata tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta berada pada kategori sedang. Variabel yang mempengaruhinya adalah: usia, tingkat pendidikan terakhir, lama usaha, dan omzet penjualan per-bulan berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai literasi keuangan syariah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM Kota Gorontalo yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disusun diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu:

1. Pandemi COVID-19 berimbas besar pada kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
2. Data survei menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan.
3. UMKM merupakan salah satu pihak pergerakan perekonomian nasional tetapi kinerjanya masih rendah karena kurangnya akses pemodalan.
4. Sulitnya UMKM untuk memaksimalkan kinerjanya karena permasalahan kurangnya literasi keuangan UMKM yang rendah yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan dan menggunakan produk jasa keuangan secara maksimal.
5. Tingkat literasi keuangan di Provinsi Gorontalo adalah yang paling terendah di wilayah Sulawesi sebesar 31,23%.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Pertanyaan penelitian yang timbul berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya adalah:

1. Seberapa besar pengaruh gender terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo?
2. Seberapa besar pengaruh usia terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo?

3. Seberapa besar pengaruh lama usaha terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo?
4. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo?
5. Seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo?
6. Seberapa besar pengaruh gender, usia, lama usaha, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh gender terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.
2. Untuk menguji pengaruh usia terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.
3. Untuk menguji pengaruh lamanya usaha terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.
5. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.

6. Untuk menguji pengaruh gender, usia, lama usaha, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, khususnya mahasiswa Jurusan Manajemen yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat analisis literasi keuangan syariah pada UMKM di Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo.